

Banyak Desa di Kab. Bogor Masih Blankspot Internet

CIBINONG (IM) - Kabupaten Bogor memiliki puluhan desa yang menjadi area blankspot internet meski daerah itu merupakan wilayah satelit Ibu Kota DKI Jakarta. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto mengatakan ada 35 desa yang tidak memiliki jaringan saluran internet atau blankspot.

Akibat masih terisolir dari jangkauan internet, Bayu mengatakan, pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan informasi sulit diperoleh puluhan desa itu.

"Sementara yang kita inventarisir ada sekitar 35 desa yang masuk katagori belum merdeka sinyal dan tentunya kita masih kaji terus," kata Bayu saat menghadiri kegiatan pelatihan kapasitas Camat di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Senin kemarin.

Bayu mengatakan, area blankspot internet ditemukan di level desa yang jauh dari

pusat Kecamatan. Sedangkan jaringan sinyal untuk wilayah sekitar kecamatan masih stabil dan sangat baik.

"Kalau untuk tingkat kecamatan jaringannya sudah bagus, karena kita sudah mendapatkan supporting dari kementerian. Namun, kalau untuk tingkat desa kita sedang berupaya untuk menghilangkan blankspot, kita itu pengen desa itu merdeka sinyal," kata Bayu.

Untuk wilayah pedesaan yang masuk kategori blankspot internet atau susah sinyal, pemerintah kabupaten Bogor akan mendorong ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar ke 35 desa tersebut segera memiliki jaringan sinyal. "Kita sedang berkoordinasi dengan provinsi, karena memang operator diatur oleh pusat, kalau operator bisa memberikan kontribusinya khususnya bagi desa yang belum tersentuh sinyal," kata Bayu. ● **gio**

488 Hewan Ternak di Kota Bogor Berproses Menuju Pulih

BOGOR (IM) - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor, saat ini masih terus berkoordinasi mengatasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di Kota Bogor. Saat ini, dari data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, ada 488 hewan ternak yang sedang dikarantina akan segera pulih. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan PMK ini tidak terhindarkan di 22 provinsi di seluruh Indonesia. Termasuk di Kota Bogor, Jawa Barat.

"Semua sudah terdampak. Tetapi saat ini kami melihat langkah langkah cepat kami telah ada hasilnya. Ada 488 yang sudah recover, berproses menuju pulih dan menuju normal," kata Bima Arya kepada awak media, Selasa (21/6).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, berdasarkan catatan DKPP Kota Bogor seluruh hewan ternak berisiko ganda

otomatis menjadi suspek. Sementara itu, tercatat ada satu ekor yang mati dan bergejala PMK sebanyak 54 ekor hewan ternak.

Oleh karenanya, Bima Arya menegaskan, Forkopimda Kota Bogor mengambil kebijakan untuk menutup arus keluar masuk hewan ternak ini sampai 29 Juni 2022. "Tapi kita awasi betul di wilayah jang sampai terjadi penjualan yang tidak bisa di monitor," tegasnya.

Bima Arya bersama Dandim 0606/ Kota Bogor, Letkol Inf. Ali Akhwan dan Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro pun menyambangi Rumah Potong Hewan (RPH) di Bubulak, Kecamatan Bogor Barat mengenalkan pakaian hazmat.

Ia mengatakan, tak hanya menutup akses keluar masuk hewan ternak, Satgas Penanganan PMK akan memberikan vitamin dan obat-obatan untuk hewan ternak. ● **gio**



EDUKASI TENTANG TUGAS PEMADAM KEBAKARAN

Petugas pemadam kebakaran memberikan edukasi tentang alat pemadam kebakaran kepada siswa SD saat pengenalan profesi Damkar di Pos Pemadam Kebakaran, GDC, Depok, Jawa barat, Rabu (21/6/2022). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengenalan dan edukasi tentang tugas pemadam kebakaran kepada anak usia dini.

Pascalongsor, Perjalanan KA Pangrango Bogor-Sukabumi Normal Kembali

BOGOR (IM) - Pascalongsor di daerah Cibadak, Kabupaten Sukabumi Senin kemarin, kereta api Pangrango (KA Pangrango) Bogor-Sukabumi kembali beroperasi normal, Selasa (21/6).

Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunnisa dalam keterangan resminya, evakuasi longsoran dan sterilisasi jalur rel Kereta Api (KA) di KM 38+5 antara Stasiun Cibadak-Parungkuda, Senin (20/6). Longsor yang menutup jalur rel tersebut terjadi sekitar pukul 16.42 WIB.

Kata Eva, pengguna jasa KA Pangrango diimbau agar menggunakan alternatif transportasi lainnya. Bagi pengguna jasa yang telah membeli tiket dan terdampak pembatalan dapat melakukan pengembalian tiket dengan penggantian bea 100 persen sesuai harga tiket.

Eva mengungkapkan pengembalian bea tiket dapat dilakukan di loket stasiun terdekat yang melayani perjalanan KA Pangrango.

Proses pengembalian dapat dilakukan hingga 14 hari ke depan sehingga pengguna jasa yang telah membeli tiket tidak perlu terburu-buru menuju stasiun untuk proses pembatalan.

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait perjalanan KA Pangrango dapat menghubungi saluran informasi resmi milik PT KAI (Persero), kontak center melalui telepon di 121, WhatsApp KAI121 di 08111-2111-121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121. ● **pp**

8 | Nusantara



PAMERAN BERSAMA EMPAT MUSEUM

Sejumlah pelajar mengamati koleksi museum yang dipajang saat pameran bersama empat museum bertema Patriotisme di Museum Dr Soetomo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/6). Pameran yang memamerkan sejumlah koleksi dari Museum Konferensi Asia Afrika Bandung, Museum Sandi BSSN Yogyakarta, Museum AAL Loca Jala Crana Surabaya, dan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta itu berlangsung hingga 23 Juni 2022.

38 Ribu Hektare Hutan Mangrove di Pantura Jawa Barat Rusak

Berdasarkan data yang ada di DLH, kerusakan degradasi habitat mangrove di seluruh pantai di Jabar mencapai 61 persen dan kerusakan ekosistem terumbu karang sekitar 44 persen. Daerah Pantura yang hutan mangrovenya rusak di antaranya ada di Subang, Karawang, Indramayu dan Cirebon.

BANDUNG (IM) - Hutan mangrove di Jawa Barat saat ini kondisinya banyak yang rusak.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Prima Ma-

yaningtyas, dari 43 ribu hektare lahan mangrove di Pantai Utara (Pantura), yang mengalami kerusakan mencapai 90 persen atau sekitar 38.000 hektare.

Berdasarkan data yang ada di DLH, kerusakan degradasi habitat mangrove di seluruh pantai di Jabar mencapai 61 persen dan kerusakan ekosistem terumbu karang sekitar 44 persen. "Yang di (Pantai) Utara Jawa Barat saja, itu 90 persen sudah rusak. Itu di luas (total) 43 ribu hektare itu, 90 persennya sudah rusak," ujar Prima Mayaningtyas

usai membuka acara Forum Group Discussion Restorasi Mangrove di Pesisir Utara, di Kota Bandung, Selasa (21/6).

Prima menjelaskan, daerah Pantura yang hutan mangrovenya rusak di antaranya ada di Subang, Karawang, Indramayu dan Cirebon. Kondisi itu menunjukkan bahwa penanaman mangrove membutuhkan upaya ekstra.

"Karena kalau mangrovenya kondisi rusak atau tidak ada akan berdampak besar bagi lingkungan. Seperti banjir rob karena mangrove tak bisa jadi berier lagi oleh karena itu kita berupaya agar kondisi mangrove bisa semakin kuat," ujarnya.

Selain itu, menurut Prima, kerusakan mangrove menandakan bahwa perubahan iklim sudah terjadi saat ini.

"Kita tahu iklim berubah dan ada lima sektor emisi yang membuat gas emisi rumah kaca kita semakin besar ke bumi ini," katanya.

Kemudian, kata dia, akan ada perubahan iklim yang besar baik dari sisi energi pertanian, kehutanan hingga limbah domestik. Dengan kondisi tersebut kita ambil satu dari aspek tutupan lahan saat ini tidak hanya hutan yang ada dipegunungan yang rusak tapi juga mangrove kondisinya rusak.

"Karena efek dari gas rumah kaca yang membuat permukaan air menjadi tinggi," katanya.

Menurutnya, dengan tak

adanya green belt mangrove ini maka tak bisa menahan akar sehingga akan terjadi banjir. Apalagi, eksploitasi juga terjadi di wilayah mangrove tersebut.

"Makanya kami juga mengajak komunitas untuk mengatasi permasalahan mangrove ini karena kalau hanya pemerintah itu susah," katanya.

Prima mencontohkan, di daerah Indramayu banyak daerah yang terkena abrasi akibat kerusakan mangrove. Penanggulangan kerusakan mangrove ini sejalan dengan arahan presiden.

"Upaya yang dilakukan oleh DLH mengatasi kerusakan mangrove ini dilakukan dengan 2 dinas terkait yang lain. Kami berkolaborasi dengan Diskanlu dan Dishtu. Khusus di DLH ada bidang yang namanya bidang konservasi sumber daya alam. Bidang ini yang akan handle masalah kerusakan mangrove," ujarnya.

Sementara menurut Ketua Yayasan Wanadri, Tri Wahyu, ada 190 hektare rusak yang di data oleh Wanadri di wilayah Mayangan Pantura Subang. Artinya, Wanadri mencoba membuat permodelan dari sebuah penelitian.

"Nanti tergantung pema dukungannya seperti apa. Kami mencoba membuat sebuah model baik itu penelitian sampai pemantauan mangrove. Karena penanaman mangrove tak bisa dilakukan sepanjang tahun tapi ada waktu tertentu," katanya. ● **pra**

MENEKAN HARGA MINYAK GORENG

Disdagin Kabupaten Bogor Sinergitas dengan Distributor dan Pasar Tohaga

CIBINONG (IM) - Untuk menekan harga minyak goreng tinggi di wilayah Kabupaten Bogor agar sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah, institusi di Kabupaten Bogor bergandeng tangan dengan sejumlah distributor untuk melakukan pengawasan.

Sinergitas ini, dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pembab) Bogor, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) bersama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Tohaga dan para distributor dalam sebuah rakor di Cahaya Village Hotel, Megamendung, Kabupaten Bogor, Selasa (21/6).

Rakor dengan sejumlah narasumber ini termasuk dari Kementerian Perdagangan RI, Polres Bogor, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Sekretariat Daerah dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor yang jumlahnya sekitar 55 orang berasal dari Perumda Pasar Tohaga dan para distributor minyak goreng di Kabupaten Bogor.

Pada kesempatan ini, Kepala Disdagin Kabupaten Bogor, Entis Sutisna mengungkapkan, menjelang Idul Adha harga sembako mulai merangkak naik.

"Hari ini kita akan berdiskusi untuk menyamakan persepsi mengenai persoalan pengawasan distribusi minyak goreng di lapangan," katanya.

"Untuk level minyak

goreng, sebetulnya menjadi kewenangan pusat. Selama ini untuk mengawasi distribusinya di daerah, kami punya tim yang di dalamnya ada Polres Bogor dan Kejaksaan Negeri yang diterjunkan secara rutin untuk memantau di pasar-pasar," jelas Entis.

Entis menilai, pihaknya berharap ke depannya, ada komunikasi antara pemerintah pusat dengan pengusaha dan petani, dalam menentukan harga eceran tertinggi.

"Sehingga nantinya bisa menentukan harga di tengah-tengah. Jadi semua komunikasi difasilitasi untuk kepentingan bersama," terang Entis.

Entis juga berharap, kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik sehingga terjadi persamaan persepsi dan sinergi antar Pembab Bogor bersama seluruh stakeholder terhadap pengawasan distribusi minyak goreng di lapangan.

Untuk diketahui, Disdagin Kabupaten Bogor tahun ini berencana meluncurkan aplikasi untuk masyarakat dalam memantau harga-harga kebutuhan bahan pokok. Aplikasi tersebut diharapkan bisa segera selesai, sehingga perkembangan harga-harga bisa dipantau langsung oleh masyarakat secara real time.

"Nama aplikasi dan fiturannya masih dalam pembahasan agar menemukan nama yang pas dan mudah diingat masyarakat," ucap Entis. ● **gio**

Pelototi PMK, Pemkab Bogor Bentuk Tujuh Posko Satgas

CIBINONG (IM) - Ribuan hewan ternak di Kabupaten Bogor dinyatakan terpapar virus PMK Pemerintah Kabupaten Bogor pun bergerak cepat membentuk tujuh posko satgas penanganan PMK.

Satgas berpatroli di wilayah seluas 2.986 kilo meter persegi atau wilayah paling luas ke empat di Jawa Barat Setelah Sukabumi, Cianjur dan Garut. "Karena kejadiannya sudah luar biasa, maka Satgas PMK yang kami bentuk berskala besar lintas sektoral menjadi Satgas PMK tingkat Kabupaten Bogor," kata Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan, kemarin.

Iwan bertindak sebagai pembina dan penanggungjawab. "Ada Sekda dan penanggungjawab hariannya dari Diskanlu. Ini kami lakukan agar semua bergerak cepat menangani PMK ini," tambah Iwan Setiawan.

Iwan juga meminta agar tujuh Posko Satgas PMK lebih dimaksimalkan fungsinya terlebih menjelang Hari Raya Idul Adha ini.

"Kita sudah buat kebijakan di H-10 Idul Adha semua Satgas yang ada di tujuh Posko penanganan PMK dimassifkan untuk memeriksa kondisi hewan ke seluruh peternakan yang ada di Kabupaten Bogor," kata Iwan.

Ketujuh posko PMK tersebut antara lain; Posko 1 di Cibinong, Bojonggede, Kemang,



Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan memimpin rapat antisipasi PMK.

Ciseeng, Parung, Gunungsindur. Posko 2 Babakan Madang, Citeureup, Sukaraja, Megamendung, Ciawi, Cisarua.

Posko 3 Jonggol, Cariu, Tanjungsari, Sukamakmur, Klapanunggal dan Cileungsi. Posko 4 Ciomas, Dramaga, Tamansari, Cijeruk, Cigombong dan Caringin. Posko 5 Pamijahan, Cibungbulang, Rancabungur, Ciampea, Tenjolaya, Leuwiliang dan Leuwisadeng. Posko 6 Cigudeg, Rumpin, Parung Panjang, Tenjo, Jasinga, Sukajaya dan Nanggung. "Posko ke 7 ada di Diskanlu," kata Iwan.

Selain itu Iwan Setiawan juga menghimbau agar masyarakat tidak takut untuk mengonsumsi daging dan susu sapi, sebab Penyakit Mulut dan Kuku ini tidak menular kepada manusia. "Jangan takut, penyakit ini aman tidak menularkan ke manusia," im-

buhnya. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor, Otje Subagja menambahkan, untuk memperkuat tim penanganan kasus PMK, Satgas PMK kini ditingkatkan dari Satgas PMK Dinas menjadi Satgas Penanganan PMK Kabupaten Bogor.

Selain itu pihaknya juga telah melakukan kerjasama dengan IPB terkait bantuan pengobatan bagi hewan yang terpapar PMK, edukasi, dan healing psikis peternak, serta bantuan pengecekan hewan-hewan ternak jelang Hari Raya Idul Adha.

"Kita butuh kerjasama yang baik dan terpadu dalam proses mengatasi dan penanganan penyakit PMK di Kabupaten Bogor ini. Kami juga ajak semua masyarakat untuk peran aktif dalam penanganan PMK ini," pungkasnya. ● **gio**



PENYEMPROTAN DISINFECTAN DI RPH KOTA BOGOR

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor menyemprotkan cairan disinfektan di kandang sapi Rumah Potong Hewan (RPH) Bubulak, Kota Bogor, Selasa (21/6). Penyemprotan disinfektan dilakukan karena penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan sapi di RPH tersebut terus bertambah menjadi 488 ekor yang diduga terkena PMK, 54 ekor bergejala, dan seekor sapi mati sehingga Pemkot Bogor menutup sementara RPH Bubulak.